

Diduga Ada Mafia PPDB, Penegak Hukum Didesak Usut Ribuan Kursi Kosong SMAN di Banten

written by Kabar 6 | 12 Juli 2024



Kabar6-Pengamat kebijakan publik dari Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul, mendesak penegak hukum agar mengusut temuan Ombudsman Banten terkait masih banyaknya sisa kursi kosong di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) pasca berakhirnya proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024.

Berdasarkan temuan Ombudsman jumlah kursi kosong pada tingkat SMAN di tanah jawara ini tercatat sebanyak 4.684 kursi.

Bahkan, menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi

Banten menemukan angka jauh lebih besar yang disampaikan oleh Ombudsman, yakni sebanyak 6.515 kursi kosong.

****Baca Juga:** [PPDB SMAN Berakhir, Ombudsman Ungkap 4.683 Kursi Kosong di Banten](#)

“Polisi dan Kejaksaan harus segera turun usut masalah ini. Kenapa kursi masih banyak kosong, sementara para calon peserta didik saat ini masih kebingungan untuk dapat kursi. Bahkan di wilayah Tangerang Raya, ditemukan banyak siswa yang ditolak oleh pihak sekolah,” ungkap Adib, kepada wartawan, Jumat (12/07/2024).

Temuan Ombudsman Banten itu, kata Adib, bisa menjadi pintu masuk untuk mengusut masalah PPDB.

Belum lagi ada siswa miskin yang terpaksa harus mengurungkan niatnya untuk belajar di sekolah milik pemerintah.

Salah satunya, Nadiah Hasanah, pelajar yang baru saja lulus dari SMPN 19 tak bisa melanjutkan sekolah ke SMAN yang berada di Tangerang Selatan.

Pelajar piatu yang tinggal di Rawa Mekar Jaya No 42 RT003/003, Kecamatan Serpong Tangsel ini, sudah mendaftar masuk lewat PPDB online lewat jalur prestasi nonakademik tapi namanya tidak muncul di PPDB online maupun SK SMAN 9 Tangerang Selatan.

“Periksa semua panitia PPDB itu, kursi dibiarkan kosong itu buat apa. Kami curiga jangan-jangan ada mafia PPDB yang bermain,” katanya. (Tim K6)

Temuan Pelanggaran Pasang APK, Bawaslu Banten: Terbanyak di Tangsel

written by Editor2 - | 12 Juli 2024



Kabar6-Bawaslu Banten melansir catatan pelanggaran alat peraga kampanye (APK). Hasilnya paling banyak temuan pelanggaran di Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

“Total keseluruhan kabupaten/kota se-Banten sebanyak 42.588,” ungkap Ketua Bawaslu Provinsi Banten, Ali Faisal, Kamis (11/1/2024).

Ia menyebutkan kategori temuan pelanggaran adalah memasang pada jalan-jalan protokol dan di pohon-pohon dengan cara dipaku. Temuan pelanggaran pemasangan APK cukup masif.

“Memang paling banyak pelanggaran di Kota Tangsel,” terang Ali. Jumlah pelanggaran pemasangan APK di Tangsel mencapai 10.283.

“Belum kami klasifikasi partai per partai,” ujarnya. Ali juga mengakui penertiban APK yang melanggar belum menyeluruh.

**Baca Juga: [Tengah Penertiban APK, Ketua Panwaslu Panongan](#)

Ditabrak Orang Tak Dikenal

Masih banyak APK terpasang di titik-titik lokasi yang dilarang. Ali janji penertiban masih akan dilanjutkan secara bertahap.

Pelanggaran kedua di Kabupaten Pandeglang sebanyak 7.900 APK. Di Kabupaten Serang menempati urutan ketiga pelanggaran mencapai 7.709 APK.

Selanjutnya di posisi keempat sampai terakhir yaitu Kabupaten Tangerang dengan 7.263 APK, Kabupaten Lebak 7.202 APK, Kota Tangerang 5.472 APK, Kota Cilegon 2.634 APK dan Kota Serang 1.879 APK melanggar.(yud)

Dinkes Tangsel Catat Temuan 64 Kasus Positif Covid-19

written by Editor2 - | 12 Juli 2024



Kabar6-Kasus warga di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terkonfirmasi positif Covid-19 kembali muncul. Per 12 Desember

2023 tercatat ada temuan sebanyak 64 kasus.

“Ada penambahan 23 kasus dan terdapat kenaikan 7 kasus atau 43,7 dibandingkan dengan hari sebelumnya,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel, Allin Hendalin Mahdaniar, Rabu (13/12/2023).

Berdasarkan verifikasi lapangan terdapat 2 orang yang menjalani perawatan di rumah sakit dan lainnya menjalani isolasi mandiri di rumah. Peningkatan tren kasus di Kota Tangsel, Allin klaim, tidak diikuti dengan peningkatan kasus kematian Covid 19.

Dinas Kesehatan Kota Tangsel melakukan pemantauan perkembangan tidak hanya pada kasus Covid-19. Pantauan tren peningkatan kasus Influenza Like Illness (ILI), pneumonia, SARI melalui sistem kewaspadaan dini dan respon (SKDR) maupun surveilans sentinel ILI-SARI (Severe Acute Respiratory Infection).

“Melalui UPTD Puskesmas dilakukan pemantauan terhadap pasien-pasien Covid-19 di Kota Tangerang Selatan,” jelasnya.

Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat agar melengkapi vaksinasi untuk meningkatkan kembali antibodi dalam tubuh. Selain itu vaksinasi tidak hanya untuk melindungi diri sendiri tetapi juga orang lain.

Allin bilang, saat ini Dinas Kesehatan Kota sudah mengajukan permintaan vaksin Covid-19 ke Provinsi Banten. Vaksin akan segera di droping ke fasilitas pelayanan kesehatan.

“Jenis vaksin yang dapat digunakan oleh masyarakat adalah vaksin buatan dalam negeri,” ungkapnya.

Senin, 11 Desember 2023 Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran nomor HK.02.02/C/4815/2023 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Lonjakan Kasus Covid 19.

**Baca Juga: [Kawasan Pantai Anyer Cinangka Dinyatakan Aman Dikunjungi Wisatawan saat Natal dan Tahun Baru](#)

Situasi covid-19 di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan tren kasus sejak minggu ke-41 atau 8-14 Oktober 2023.

Vaksinasi dosis lengkap maupun booster bisa didapatkan secara GRATIS di UPTD puskesmas, rumah sakit atau pos vaksinasi terdekat di daerah masing-masing. Cara mendapatkannya mudah, hanya perlu menunjukkan KTP atau identitas lainnya kepada petugas vaksinasi.

Meskipun sudah vaksinasi lengkap masyarakat perlu menerapkan protokol Kesehatan, tetap gunakan masker terutama yang sakit atau saat berada di tempat umum yang berisiko, segera periksa jika ada gejala demam, batuk, pilek, sesak nafas dan kalau hasilnya positif serta tidak memerlukan perawatan di rumah sakit, lakukan isolasi mandiri.

“Tunda perjalanan ke negara atau daerah yang sedang ada peningkatan kasus tetapi kalau tidak bisa ditunda terapkan protokol Kesehatan dengan baik,” tutup Allin.(yud)

Kata Walikota Cilegon Soal Temuan LHP Inspektorat Banten

written by Editor2 - | 12 Juli 2024



Kabar6-Walikota Cilegon, Helldy Agustian, mengaku tidak memiliki masalah pribadi dengan Taufikurrahman. Dia malah berterimakasih, karena BUMD PDAM Cilegon Mandiri telah memberikan keuntungan bagi daerah.

Helldy mengaku kalau dia sudah berusaha membantu Taufikurrahman ke Inspektorat Provinsi Banten dan Inspektur Jenderal Kemendagri, untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Sebetulnya kami sudah membuat surat tentang keberatan kami kepada Inspektorat Provinsi Banten. *Udah* ke Inspektorat dua kali, ke Irjen dua tiga kali. Dasarnya kami tidak ada masalah pribadi, kami hanya menjalankan dalam bentuk LHP, jadi harus diputuskan. Kami hanya menjalankan perintah LHP,” ujar Helldy Agustian, Walikota Cilegon, di kantornya, Senin, (18/09/2023).

Berikut hasil LHP Inspektorat Provinsi Banten, yang dibacakan oleh inspektorat Kota Cilegon;

1) Sesuai dengan ketentuan pembayaran gaji atau tunjangan. Menyelesaikan sesuai dengan ketentuan atas pembayaran gaji dan tunjangan sebagai direktur definitif.

2) Melakukan pengisian jabatan direksi dan anggota dewan pengawas PDAM Cilegon Mandiri sesuai dengan syarat jabatan dan melalui seleksi sesuai peraturan perundang-undangan.

3) Memberikan teguran secara tertulis kepada pejabat yang membawahi pimpinan BUMD pada tahun 2020.

Sebelumnya diberitakan bahwa Taufikurrahman kesal dirinya dihinggapi kabar hoax, dengan beredarnya isu kalau dia menerima gaji ganda saat menjabat Dirut PDAM Cilegon Mandiri sejak 2020. Akibat isu tidak benar itu, dirinya dipecat dari pucuk pimpinan pada Senin, 18 September 2023.

****Baca Juga: [Dituding Terima Gaji Ganda, Mantan Dirut PDAM Cilegon Pidanakan Kepala Inspektorat Banten](#)**

Isu itu muncul setelah Plt Inspektorat Pemprov Banten, M. Trenggono, mengatakan kalau Taufikurrahman menerima gaji ganda dan harus mengembalikannya. Tidak terima dituding seperti itu, dia akan melaporkan banyak pihak, termasuk M. Trenggono, yang menyatakan adanya temuan di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

“Kalau Pak Trenggono iya menyampaikan ada gaji ganda, kita akan proses (pidana),” kata M. Imam Nasef, pengacara mantan Dirut PDAM Cilegon Mandiri, Senin, (18/09/2023).

Selaku pengacara, dia menilai sangat janggal jika Inspektur jenderal Kemendagri sampai menilai LHP Provinsi Banten. Lebih jauh lagi, M. Imam Nasef menilai kalau ada dugaan skenario yang dibuat untuk menurunkan Taufikurrahman dari jabatan Dirut PDAM Cilegon Mandiri.

Pria berkacamata itu menyarankan jika Walikota Cilegon, Helldy Agustian ingin memasang orangnya sebagai Dirut PDAM Cilegon, tidak usah membuat skenario penurunan Taufikurrahman. Karena sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM), memiliki kewenangan tersebut. Lantaran PDAM berstatus BUMD Kota Cilegon.

“Kalau walikota (Cilegon) mau memberhentikan Dirut PDAM punya kewenangan sebenarnya. Jadi enggak perlu sampai ke Inspektorat Kemendagri. Kalau dia mau menempatkan orang lain, dia ada kewenangan *kok*. Jadi dengan melibatkan Kemendagri itu seperti sudah di-*desaign*,” jelasnya.(Dhi)

Vermin Berkas Bacaleg, Ini Temuan KPU Kota Tangerang

written by Editor2 - | 12 Juli 2024



Kabar6-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang masih berlangsung melakukan verifikasi administrasi (Vermin) bakal calon legislatif (Bacaleg) dari partai politik.

Dalam Vermin tersebut, KPU Kota Tangerang menemukan sejumlah kekurangan dokumen persyaratan dari Bacaleg. Para bacaleg tersebut diminta melakukan perbaikan melalui partai politik.

“Sampai saat ini tahapan Vermin masih berlangsung sampai tanggal 23 Juni,” ujar Ketua KPU Kota Tangerang, Ahmad Syailendra, saat dimintai keterangan, Selasa (6/6/2023).

**Baca Juga: [Balawista Lebak Usulkan Tambahan Perlengkapan Penyelamatan](#)

“Ada beberapa kekurangan dokumen persyaratan yang harus dilakukan perbaikan oleh bakal calon melalui partai politik,” sambung Indra sapaan akrabnya.

Saat disinggung jumlah partai politik para baceleg yang kekurangan dokumen persyaratan, Indra tidak menyampaikan secara rinci. Namun ia menyebut hanya sebagian parpol saja. “Sebagian saja,” katanya.

KPU Kota Tangerang telah menerima pendaftaran sebanyak 18 Parpol yang telah mendaftarkan, total ada sebanyak 764 Bacaleg. Terdapat sebanyak 482 Bacaleg laki-laki dan 282 perempuan. (Oke)

Temuan Ribuan Kartu Indonesia Pintar Berserakan di Lapak Rongsok Harus Diusut Tuntas

written by Editor2 - | 12 Juli 2024



Kabar6-Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Lebak Acep Dimiyati meminta penemuan ribuan kartu Indonesia pintar (KIP) yang berserakan di sebuah lapak barang bekas diusut tuntas.

“Informasi yang saya dapat kartu KIP itu memang sudah kedaluwarsa dan tidak terserap,” kata Acep saat dihubungi, Kamis (13/4/2023).

Walaupun ribuan kartu program Pemerintah Pusat tersebut sudah

kedaluwarsa dan negara tidak dirugikan, akan tetapi Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyayangkan lantaran kartu tidak sampai ke siswa penerima.

“Saya menyayangkan kartu-kartu tersebut tidak sampai ke penerimanya, yang seharusnya dapat membantu siswa miskin dalam menunjang kebutuhan sekolah. Ini harus diusut tuntas penyebab kenapa sampai tidak tersalurkan,” tegas Acep.

**Baca Juga: [Kronologi Ribuan Kartu Indonesia Pintar Ditemukan di Lapak Rongsok Lebak](#)

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Lebak Iptu Andi Kurniady mengatakan, proses penyelidikan masih berjalan terkait temuan ribuan KIP tersebut.

“Masih proses nanti kalau udah selesai kami akan rilis,” singkat Andi.(Nda)

Temuan Penting Polisi di Lokasi Mantri Suntik Mati Kades di Banten

written by Editor2 - | 12 Juli 2024



Kabar6-Botol bekas berisikan cairan suntikan ditemukan polisi dari lokasi kejadian dan dijadikan barang bukti. Cairan dalam botol itu diduga menjadi racun yang disuntikan mantri S ke tubuh Salamunasir, Kades Curug Goong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten, pada Minggu, 12 Maret 2023.

Botol itu bermerk Sidiandryl Diphenhydramine. Dokter forensik telah mengambil sampel dari tubuh korban. Guna memastikannya, memerlukan waktu.

“Barang bukti yang kami kumpulkan itu berupa satu botol obat cairan merk Sidiandryl Diphenhydramine, dan jarum suntik. Kita berkirin surat ke ahli, jadi yang mempunyai keahlian itu yang akan menerangkan,” ujar Wakapolresta Serkot, AKBP Hujra Soumena, di kantornya, Senin (13/03/2023).

Terkait motif keributan hingga penyuntikan, masih dilakukan pendalaman oleh kepolisian, karena harus mencocokkan keterangan dengan barang bukti yang ada.

Termasuk menunggu hasil otopsi dan pemeriksaan sampel darah korban yang akan diperiksa tim dokter forensik, guna memastikan penyebab kematian Salamunasir.

“Ada sampel dari tubuh korban yang diambil untuk memastikan penyebab kematiannya, apakah benar karena obat ini sebenarnya atau bukan,” jelasnya.

****Baca Juga:** [Keluarga Duga Kades Curug Goong Dibunuh Secara Berencana](#)

Polisi menyampaikan, pada Minggu, 12 Maret 2023, pelaku S datang ke rumah korban sekitar pukul 13.00 wib. Kemudian keributan terjadi, tiba-tiba pelaku menyuntikkan sesuatu cairan ke punggung kiri Salamunasir.

Tak berapa lama, korban mengalami sesak nafas dan kejang-kejang, sehingga dibawa ke Puskesmas Padarincang oleh warga, keluarga serta pelaku S. Salamunasir kemudian dirujuk ke RSUD Banten untuk penanganan lebih lanjut.

Salah satunya keluarga korban ada yang mendatangi polisi dan melaporkan kejadian tersebut. Pelaku yang ikut ke RSUD Banten kemudian dijemput penyidik Satreskrim Polresta Serkot untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

“Saat di RS, Kasatreskrim menugaskan anggota ke sana dan pada saat anggota sampai di RS, kebetulan terduga pelaku ada di RS, sekaligus saat itu juga diamankan,” terangnya. (Dhi)

Temuan Korlantas Polri dari Tragedi Odong-odong Maut di Serang

written by Kabar 6 | 12 Juli 2024



Kabar6-Tim dari Korlantas Polri menemukan sejumlah penyebab kecelakaan angkutan odong-odong yang tertabrak kereta api di pintu perlintasan liar di Desa Silebu, Kragilan, Kabupaten Serang. Peristiwa itu menyebabkan sembilan orang warga tewas dan 10 luka-luka pada Selasa siang kemarin.

“Dari observasi di TKP terlihat nyata adanya kerawanan laka ketika ada kondisi jalan menurun dihadapkan pada bidang berpotensi bahaya,” ungkap Kombes Hotman Sirait, Rabu (27/7/2022).

Ia berpendapat ada halangan untuk memandang bebas ke arah perlintasan. Faktanya juga kendaraan odong-odong tersebut dimensi panjangnya telah ditambah sekitar semeter.

****Berita Terkait: [Tragedi Odong-odong Ditabrak Kereta Api, 2 Anak Tewas dan Bayi 7 Bulan Terluka](#)**

Sehingga, lanjut Hotman, subjek hukum dalam perkara laka ini bukan hanya pengemudi. Namun juga sumber kendaraan yang telah menambah dimensi panjang.

Pemilik odong-odong dapat dijerat atas pelanggaran Pasal 277 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang larangan modifikasi kendaraan bermotor. “Sebagai upaya preventif, akan dipasang rambu-rambu peringatan pada 150 meter sebelum perlintasan,” terangnya.

Rambu lalu lintas berfungsi untuk menjadi perhatian pengemudi dan kecepatan pada 20-30 meter menuju perlintasan. Korlantas Polri juga akan pasang alat bantu kaca spion cekung besar untuk menjadi bantuan penglihatan pengemudi terhadap situasi di perlintasan

“Ke depan memang dibutuhkan pemasangan pos dan palang penutup lintasan yang bersifat permanen dengan penugasan personel yang tetap,” pesan Hotman.

Ia menegaskan bahwa odong-odong tidak dapat melintas di jalan umum. Jika untuk kepentingan wisata maka kendaraan tersebut hanya beroperasi pada area wisata dan sifatnya terbatas.

“Tidak dapat digunakan sebagai moda transportasi umum di jalan raya,” tegas Hotman.(yud)

Dinas Perkim Kota Tangerang Sebut Temuan BPK Sudah Ditindaklanjuti

written by Redaksi | 12 Juli 2024



Kabar6-Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang menyatakan semua hasil temuan Badan Pemerikasaan Keuangan (BPK) sudah ditindaklanjuti.

“Semua temuan BPK sudah ditindaklanjuti,” ujar Sekretaris Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Widi Hastuti saat dikonfirmasi, Selasa (8/2/2022).

Sebelumnya, Koalisi Anak Bangsa Pegiat Anti Korupsi melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkim) Kota Tangerang tahun 2020 ke Polres Metro Tangerang Kota.

Laporan tersebut dilayangkan diduga permasalahan terkait pembangunan yang ada di Kota Tangerang. Yakni pengadaan tiga paket kontruksi gedung sekolah dan sarana olahraga yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak dan terdapat harga timpang atas harga satuan.

“Maka dengan ini kami bermaksud melaporkan atas dugaan penyalahgunaan anggaran di lingkungan Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Perkim) Kota Tangerang Tahun 2020,” ujar Koordinator Koalisi Anak Bangsa Pegiat Anti Korupsi, Anov Pranata, Senin (7/2/2022).

Anov menjelaskan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang pada tahun 2020 menganggarkan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Sekolah dan Sarana Olahraga senilai Rp14.037.793.714 dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2020 senilai Rp7.368.960.350 atau 52,49 persen.

Sedangkan berdasarkan laporan temuan BPK Perwakilan Provinsi Banten, kata Anov, bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat tiga paket pekerjaan Pengadaan Konstruksi Gedung Sekolah dan Sarana Olahraga tidak sesuai spesifikasi senilai Rp94.192.753 dan terdapat satu paket pekerjaan dengan harga timpang atas harga satuan senilai Rp42.686.918.

“Pertama terkait, Penyempurnaan Pembangunan SMPN Karang Tengah tidak sesuai spesifikasi kontrak senilai Rp.2.880.774 dan terdapat harga timpang atas harga satuan senilai Rp42.686.918,” kata Anov.

Laporan itu telah dilayangkan sejak pada 12 Januari 2022 lalu ke Polres Metro Tangerang Kota.

**Baca juga: [Diduga Penyalahgunaan Anggaran Tahun 2020, Dinas Perkim Kota Tangerang Dilaporkan ke Polisi](#)

**Cek Youtube: [Pedes! Bahas Rencana Pemekaran Tangerang Utara](#)

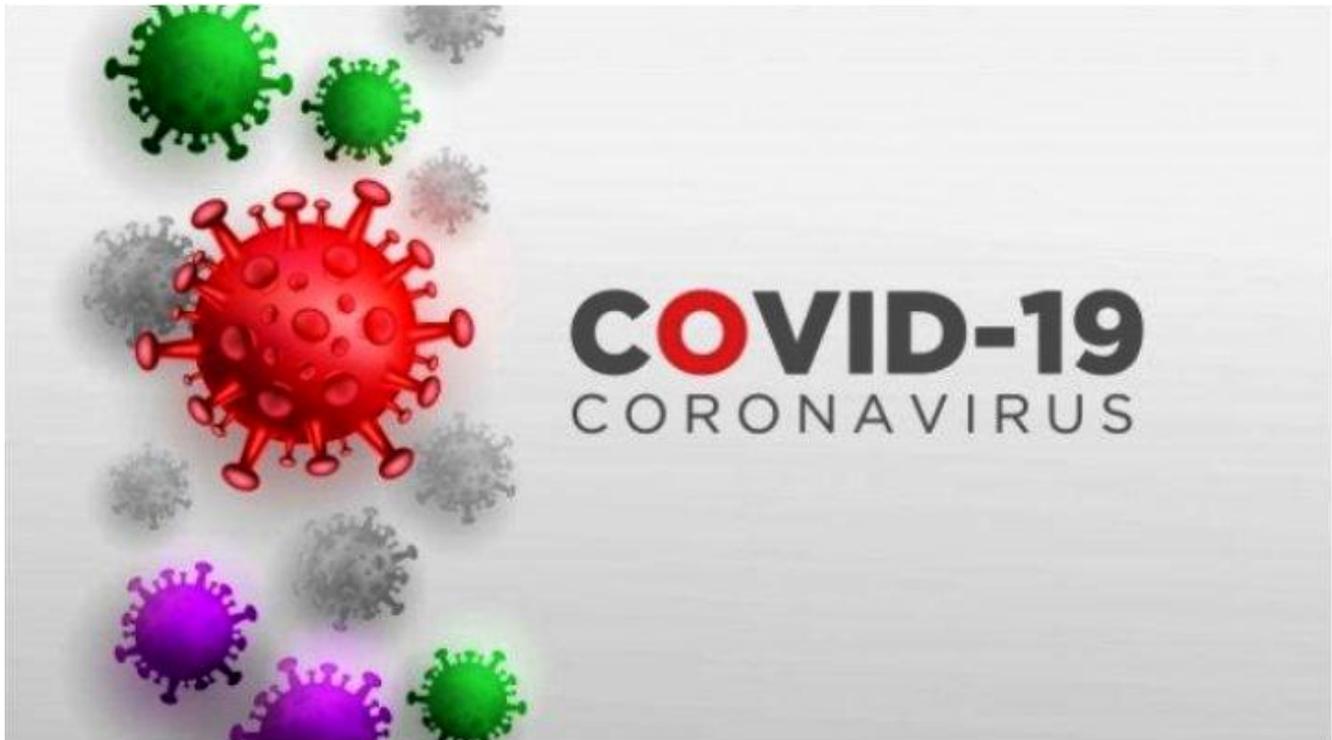
“Kedua, pekerjaan perkerasan jalur athletic Stadion Benteng tidak sesuai spesifikasi kontrak senilai Rp74.686.159. Dan ketiga, Penyempurnaan pembangunan Gedung Olahraga RW.06 Kel. Pondok Bahar tidak sesuai spesifikasi kontrak senilai Rp16.625.819,” jelasnya.

Anov meminta kepada aparat kepolisian untuk menindaklanjuti terkait laporan tersebut.

“Saya meminta kepada pihak kepolisian untuk segera menindaklanjuti laporan kami,” tegasnya. (Oke)

Ada Temuan Lagi Satu Positif Covid-19 di Lebak

written by Redaksi | 12 Juli 2024



Kabar6-Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lebak, mengumumkan satu kasus baru pasien positif Covid-19. Padahal selama dua pekan temuan kasus positif nihil.

Adanya penambahan satu kasus baru per 29 Juni 2020, maka jumlah warga terkonfirmasi sebanyak 20 orang.

“Pasien L-20 ini ber KTP Kecamatan Cibeber,” kata Juru Bicara Penanganan Covid-19 Lebak, Firman Rahmatullah saat dihubungi Kabar6.com, Selasa (30/6/2020).

Pasien L-20 ini merupakan seorang pria berusia 45 tahun. Pasien sakit dan dirawat di Rumah Sakit Pelabuhan Ratu. Hasil tes swab yang dilakukan menunjukkan positif Covid-19.

**Baca juga: [Serapan Anggaran Covid-19 di Lebak Masih Rendah.](#)

“Hari ini Gugus Tugas melakukan tracking dan penyelidikan epidemiologi (PE) untuk mencari kontak erat dengan kasus dan melakukan swab terhadap orang-orang yang melakukan kontak erat dengan pasien,” terang Firman.

Dari 20 kasus terkonfirmasi positif, 11 orang sudah dinyatakan sembuh, 8 orang masih dalam pengawasan dan 1 orang meninggal dunia.(Nda)